



DIY Digelontor PNPM Rp112,1 M

YOGYAKARTA (SINDO) – Provinsi DIY menerima kurungan dana bantuan langsung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dan Pedesaan sebesar Rp112,185 miliar. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Aburizal Bakrie mengatakan, PNPM adalah program lanjutan dari bantuan langsung tunai (BLT) yang ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan pada wilayah perkotaan dan pedesaan.

"Bantuan lewat PNPM ini adalah *cluster* ke dua setelah BLT, *cluster* ke tiga nantinya adalah dengan skema kredit usaha rakyat (KUR)," katanya saat penyerahan bantuan PNPM Mandiri di Pendopo Balai Kota Yogyakarta, kemarin.

Aburizal yang akrab disapa Ical menyatakan bahwa pada 2008 PNPM mampu menciptakan 14,4 juta lapangan kerja baru dengan 19 program di 36.000 desa dan kelurahan. Sementara pada tahun ini PNPM diharapkan menciptakan 26 juta lapangan kerja baru di 78.000 desa

dan kelurahan.

PNPM Mandiri tahun ini difokuskan pada pengentasan kemiskinan pada masyarakat perkotaan. Menurut Ical, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di pedesaan menurun drastis dibandingkan dengan angka kemiskinan di wilayah perkotaan. "Itu akibat dari urbanisasi. Sehingga, pada tahun ini PNPM kita arahkan ke wilayah perkotaan dengan tidak meninggalkan wilayah pedesaan juga," terangnya.

Dengan alasan tersebut, pemerintah menaikkan dana PNPM bagi masyarakat perkotaan Rp2,6 miliar per kecamatan dan untuk masyarakat pedesaan Rp2,3 miliar per kecamatan. Sebelumnya pada 2008 bantuan hanya sebesar Rp1,5 miliar per kecamatan. Dia menjelaskan, total dana PNPM 2009 mencapai Rp12 triliun. Menkokesra mengakui, PNPM tidak bisa dilakukan terus-menerus. Untuk itu, pemerintah sudah memikirkan *exit strategy* untuk mengakhiri program ini pada 2015 mendatang.

Walikota Yogyakarta Herry Zudianto berharap PNPM tidak menjadi program yang homogen pada seluruh daerah. Program ini seharusnya menempatkan kearifan lokal sebagai variabel fleksibilitas untuk menentukan program yang berbeda dengan daerah lain. "Untuk tahun 2010 dan seterusnya seharusnya ada variabel kearifan lokal untuk menentukan program-program pada setiap daerah," katanya.

Herry menuturkan, jika program ini dipatok dengan kaku dengan pembagian 70% untuk proyek fisik dan 30% untuk proyek non fisik, maka program yang muncul akan yang terkesan mengada-ada karena memaksakan alokasi 70% dari dana yang tersedia.

"Misalnya, pemkot juga memberikan *blockgrant* untuk pembangunan fisik. Kalau begini bisa jadi menumpuk program fisiknya. Inilah pentingnya fleksibilitas untuk program berdasarkan kearifan lokal," tandasnya.

(mn latief/arif budianto/
priyo setyawan)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Pengendalian Pembanguna	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005